

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Halim. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Abdul Halim dan Jamal A. Nasir. (2006). “*Kajian tentang Keiangan Daerah Pemerintah Kota Malang*”. *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 06/ Tahun XXXV.
- Abdul Halim dan Syukriy Abdullah. 2004. “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali”. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- Abdullah, Syukriy. (2004). *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu. Bengkulu. 4-5 Oktober 2004.
- Anggiat Situngkir. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. *Tesis*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.
- Bernanda, Gatot Tri Bawono. (2008). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). ”Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No 01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Dasril Munir dan Henry Arys Djuanda. (2002). *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI
- David Harianto, dan Priyo Hari Adi. (2007). *Hubungan antara dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pendapatan perkapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

- Haryo Kuncoro. (2007). *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Iqbal Hasan. (2008). *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jogiyanto. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta : BPFE
- Kuncoro, Mudrajad. (2007). *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta : STIM YKPN
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Munir, Dasril H. et al. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI
- Priyo Hari Adi. (2006). *Hubungan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Priyo Hari Adi. (2007). *Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonom*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sudjana. (1997). *Statistika Untuk Ekonomi dan Niaga II*, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Supramono dan Intiyas Utami. (2004). *Desain Proposal Penelitian Studi Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta : Andi.
- Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi. (2007). *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran?.* Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

_____. Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Jawa Barat
Tersedia : www.djpk.depkeu.go.id atau jabar.bps.go.id

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika.
Jakarta.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika.
Jakarta.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

